



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam

**RANCANGAN AKHIR
RENJA TAHUN**

2022

Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerah-NYA, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2022.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2022 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2022 disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian, dengan demikian semua program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam sangat ditentukan dari kemampuan seluruh ASN dalam menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan dokumen Ranhir Renja tersebut. Selanjutnya tak kalah penting diperlukan pemantauan, evaluasi dan review secara berkala terhadap pelaksanaannya guna peningkatan kinerja organisasi dan mutu pelayanan informasi bagi masyarakat.

Batam, 09 Agustus 2021



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2020 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KOTA BATAM	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis (Renstra)	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	35
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM	50
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	50
3.3. Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM	62
BAB V PENUTUP	70
Form E.70	71
Form E.71	74

DAFTAR TABEL

		Hal
2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Daerah s.d Tahun 2020 (Renstra Awal dan Renstra Perubahan)	8
2.1.1.	Realisasi capaian program dan kegiatan TA. 2020	14
2.2	Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	18
2.2.1.	Daftar aplikasi informatika yang memenuhi kriteria dan peraturan yang berlaku Tahun 2020	18
2.2.2.	Daftar OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo Tahun 2020	24
2.2.3.	Laporan OPD terhadap pelaksana inventarisasi TIK	26
2.2.4.	Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan kegiatan Statistik TA. 2020	27
2.2.5.	Perkembangan data statistic sektoral yang tersedia di Kota Batam periode 2018 – 2020	28
2.2.6.	Capaian Target Indikator Kinerja Statistik TA. 2020.	28
2.2.7.	Prestasi yang telah di raih Diskominfo selama Th 2020	29
2.2.8.	Jaringan internet dan intranet Pemko Batam Th 2016 – 2020	30
2.2.9.	Website milik Pemerintah Kota Batam Th 2016 – 2020	30
2.2.10.	Rata – rata kunjungan perbulan situs pemerintah Kota Batam Th 2016 – 2020	31
2.2.11.	Layanan Publik berbasis TIK Kota Batam Th 2017 – 2020	32
2.2.12a.	Jumlah layanan public berbasis melalui web Kota Batam Th 2017 – 2020	32
2.2.12b.	Presentase Data Statistic Sektoral yang tersedia di Kota Batam Th 2017 – 2020.	33
2.2.13.	Layanan Persandian di Kota Batam sampai dengan Th 2020	34
2.2.14.	Capaian Kinerja Bidang Persandian Th 2017 & 2020 Faktor – faktor penghambat dan pendorong atau permasalahan dan solusi.	34
2.3.1.	Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2022 Kota Batam	36

2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5.	Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Batam Tahun 2022	47
3.2.	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Daerah Diskominfo Kota Batam Th 2016 – 2021	51
3.3.	Program dan Kegiatan Diskominfo Tahun 2016-2024.	53
3.3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju	55
4.1	Rencana Kerja Perangkat Daerah Diskominfo Th 2022	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan selanjutnya menjadi pedoman bagi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika, melaksanakan fungsi secara optimal melalui program-program yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Batam, sehingga dapat menyusun target kerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2022. Dengan demikian lebih memudahkan bagi OPD dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun sebelumnya, dan mentargetkan capaian kinerja pada Tahun 2022.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (duapuluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja untuk perencanaan pembangunan tahunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD Kota sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka Ekonomi Daerah, Program

Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan serta Prakiraan Maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu Indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain. Demikian halnya dengan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam juga mengikuti point-point penting yang terdapat pada RKPD Kota Batam. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan, sehingga pembangunan yang dilaksanakn oleh Pemerintah Kota Batam dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Tahun 2022 harus mempunyai keterkaitan erat dengan RKPD, RPJMD dan juga memperhatikan RPJPD. Upaya untuk mensinergikan program dan kegiatan di Tahun 2022 diantaranya melalui inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada. Selain itu juga adanya usulan-usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, maupun usulan OPD terkait melalui forum OPD yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Pelaksanaan program dan kegiatan OPD selain guna mencapai tujuan dan sasaran OPD juga diharapkan dapat mewujudkan cita-cita OPD yakni VISI Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam yaitu: *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis TIK yang Terintegrasi dan Mudah diakses Masyarakat”* .

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 dan perubahannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam untuk periode 1(satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman:

1. pelaksanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2022.
2. monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
3. penyusunan rencana anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

1.4. Sistematika Dokumen Renja

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
TAHUN 2020

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Diskominfo Kota Batam Tahun 2020, didasarkan pada Renstra Diskominfo Kota Batam Tahun 2016-2021, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Jumlah pagu anggaran Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp 19.153.360.586,31 dengan realisasi belanja sebesar Rp 18.417.487.603,00 atau 96,16%.

Pagu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.107.585.116,31 dengan realisasi belanja sebesar Rp 5.922.834.246,00 atau sebesar 96.98%.

Dan pagu Belanja Langsung Rp 13.045.775.470 dengan realisasi belanja sebesar Rp 12.494.653.357,00 atau 95,77%.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tahun Anggaran 2020 dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Diskominfo digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan Diskominfo dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan

kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dari 6 (enam) Program Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan, hanya 5 (lima) Program Renstra yang teranggarkan di Tahun 2020, serta ada 10 (sepuluh) Kegiatan yang telah dianggarkan dengan capaian Indikator kegiatan rata-rata diatas 90%.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2020 yang mengacu pada sasaran RPJMD dan Renstra Tahun 2016-2021, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini (Tabel 2.1 atau TC.29);

Tabel 2.1 (T-C.29)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2020	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan an 2021	Indikator Kinerja Program/Kegiatan 2021	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021- 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keter
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7/6)	10	11= (5+7+9)	12= (10/4)	13
Komunikasi dan Informatika												
1		Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%					100%			
1)	Kegiatan Belanja Gaji dan Tunjangan	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1 Tahun	100%	100%	100%	100%	1 Tahun	-	-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	1 Tahun					1 Tahun	-	-	

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Tahun						1 Tahun	-	-	
2)	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1 Tahun	13 paket, 7 THL	10 paket, 11 THL	10 paket, 11 THL	100%	1 Tahun	-	-	-	
		Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen alat-alat listrik	1 Tahun					1 Tahun	-	-	-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun					1 Tahun	-	-	-	
		Penyediaan bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Tahun					1 Tahun	-	-	-	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	1 Tahun					1 Tahun	-	-	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun					1 Tahun	-	-	-	
3)	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun	100%	2 paket	2 paket	100%	1 Tahun	-	-	-	

4)	Pengadaan Mebel	Terlaksananya penyediaan mebel	1 Tahun						-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Terlaksananya pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun						-	-	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun						-	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun						-	-	
5)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun						-	-	
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	100%	4 paket	4 paket	100%		-	-	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun						-	-	

		Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun					1 Tahun	-	-	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun					1 Tahun	-	-	-
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program : Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi	A (81,25 - 100) Indeks					A (81,25 - 100) Indeks	-	-	-
1)	Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah kota	100%	100%				100%	-	-	-
2)	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Publikasi kegiatan pemerintah kota Batam	1218	100%	1515	1474	97%	1218	-	-	-
3)	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	Pelayanan Informasi Publik	Persentase terlaksananya layanan informasi publik	100%	100%				100%	-	-	-

4)	Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam	Layanan Hubungan Media	Jumlah pemberitaan informasi pembangunan daerah	1250 kali	20 titik online, 8 operator, 100%				1250 kali	-	-	-
		Penyelenggara an Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah kota Batam	145 kali		12 kliping dan 100 buku, 4 event	12 kliping dan 100 buku, 4 event	100%	145 kali	-	-	-
3	Program : Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Aplikasi Informatika	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online	100%					100%	-	-	-
1)	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi ke Pusat Data	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online	100%	18 tenaga IT, 3 aplikasi, 100%	16 layanan, 52 aplikasi, 52 aplikasi, 95%, 3 aplikasi	16 layanan, 52 aplikasi, 52 aplikasi, 95%, 3 aplikasi	100%	100%	-	-	-
2)	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi	Penyelenggara an sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah OPD terhubung dan titik pemeliharaan yang dikelola dalam jaringan intra pemerintah daerah	15 titik	34 layanan internet di OPD, 75%, jaringan 24 jam pertahun	200 mpbs, 13 OPD, 60%, 1 laporan	200 mpbs, 13 OPD, 60%, 1 laporan	100%	15 titik	-	-	-

Tabel 2.1.1.1
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

No.	URAIAN	TARGET		REALISASI			KET.
		FISIK	KEUANGAN (Rp)	FISIK	%	KEUANGAN (Rp)	
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Peningkatan Administrasi Perkantoran						
a)	Peningkatan Administrasi Perkantoran	10 Paket; 11 THL	746,796,463.00	10 Paket; 11 THL	100	605,213,661.00	Sisa Anggaran (Silpa) Rp 141,582,802.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
a)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor	146,750,000.00	11 Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor	100	145.670.000,00	Sisa Anggaran (Silpa) Rp 1,080,000.00
b)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	4 Paket Pemeliharaan alat kantor serta alat angkutan		4 Paket Pemeliharaan alat kantor serta alat angkutan	100	96.044.100,00	Sisa Anggaran (Silpa) Rp 83,300.00
3.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						
a)	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	- 12 Kliping penerbitan dan penyebarluasan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah dan 100 buku; - 4 event-event pemerintah kota Batam yang terlaksana; -terlaksananya layanan gawat darurat NTPD Batam siaga 112 dan cctv Kota 100%	1.228.505.752,00	-12 kliping dan 100 buku -4 event -100%	100	1.188.816.000,00	Sisa Anggaran (Silpa) Rp 39,689,752,00

b)	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	-2401 publisitas pembangunan daerah -Web OPD yang aktif persemester 0	5.464.011.500,00	-2340 publisitas pembangunan daerah -100% 0	97.46	5.316.866.033,00	97.31	Sisa Anggaran (Silpa) Rp 147.145.467,00
c)	Peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika		0	0	0	0	0	-
d)	Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam	-19 titik cctv online; -95% rekaman cctv yang tersedia 24 jam/hari di 20 titik	2.080.859.055,00	- 20 titik cctv online; -95%	100	2.002.539.180,00	96.24	Sisa Anggaran (Silpa) Rp 78.319.875,00
4.	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi							
a)	Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi Ke Pusat Data	-14 layanan publik dan pemerintahan yang dilayani dengan aplikasi informatika; -52 aplikasi informatika yang memenuhi kriteria dan peraturan yang berlaku; -52 aplikasi informatika yang diimplementasikan; -95% Uptime email batam go.id 3 Aplikasi terintegrasi yang difasilitasi	1.591.700.000,00	-16 layanan publik dan pemerintahan yang dilayani dengan aplikasi informatika; -52 aplikasi informatika yang memenuhi kriteria dan peraturan yang berlaku; -52 aplikasi informatika yang diimplementasikan; -95% Uptime email batam go.id 3 Aplikasi terintegrasi yang difasilitasi	100	1.453.144.083,00	91,29	Sisa Anggaran (Silpa) Rp 138.555.917,00
b)	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi	-200 mbps/bandwith yang dikelola di lingkungan Pemko Batam; -13 OPD yang integrasi dengan jaringan Dinas Kominfo; -60% kepuasan pengguna layanan internet; - 1 laporan pelaksanaan inventarisasi infrastruktur TIK	1.673.745.300,00	-200 mbps/bandwith yang dikelola di lingkungan Pemko Batam; -13 OPD yang integrasi dengan jaringan Dinas Kominfo; -60% kepuasan pengguna layanan internet; - 1 laporan pelaksanaan inventarisasi infrastruktur TIK	100	1.672.505.300,00	99.92	Sisa Anggaran (Silpa) Rp 1.240.000,00
	Jumlah		13.028.495.470,00			12.480.798.357,00	95.79	Silpa Rp 547.697.113,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pembangunan bidang Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik secara online dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran melaksanakan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan capaian indikator kinerja **meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur** melalui kelancaran operasional dan pelaksanaan administrasi kantor Tahun Anggaran 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam menganggarkan belanja gaji upah buruh (Tenaga Harian Lepas) sebanyak 11 orang 12 bulan, belanja peralatan pakai habis 10 paket pekerjaan, belanja premi asuransi kesehatan 11 orang 12 bulan, belanja jasa kantor 4 paket pekerjaan, belanja BBM, belanja pencetakan dan penjiilidan dan belanja perjalanan dinas ke luar daerah maupun propinsi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan pelayanan administrasi yakni : melayani surat menyurat kedinasan 942 surat keluar, 219 Nota Dinas, 109 SK Kepala Dinas, 293 Surat Perintah Tugas (SPT) dan 1.587 surat masuk; melayani 25 rapat dan kunjungan studi dari Kementerian/Kab/Kota, melayani permohonan cuti 18 ASN dan penerbitan SKP 32 ASN dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melaksanakan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan capaian indikator kinerja meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur melalui pemeliharaan alat-alat kantor yakni perawatan AC, Komputer dan Mesin fotocopy serta pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4.
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
 - a Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, dengan capaian Indikator Kinerja :

- Terlaksananya penerbitan dan penyebarluasan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah, target 112 (12 klipring dan 100 buku) terealisasi 100%;
 - Tersedianya Profil Daerah yang dibuat, target 1 video, terealisasi 100%;
 - Event Pemerintah Kota Batam yang terlaksana, target 4 event, tereal.
- b. Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, dengan capaian indikator kinerja:
- Terlaksananya publisitas pembangunan daerah, target 2401 terealisasi 2340 atau 97.46%;
 - Terlaksananya diseminasi informasi dan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah, target 2401 terealisasi 2340 atau 97.46%;
 - Terlaksananya web OPD yang aktif persemester, target 43 OPD, terealisasi 90.7% atau hanya 4 OPD Kecamatan yang tidak aktif.
- c. Kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam, dengan capaian indikator kinerja:
- Jumlah titik CCTV online, target 19 titik, terealisasi 20 titik atau 100%;
 - Persentase rekaman CCTV yang tersedia 24 jam/hari di 19 titik CCTV, target 19 titik, terealisasi 20 titik CCTV atau 100%.
- d. Kegiatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika, dengan capaian indikator kinerja:
- Tersedianya SOP tentang pelaksanaan E-government, target 1 SOP, terealisasi 100%.
4. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi, melaksanakan:
- a. Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang terintegrasi ke Pusat Data, dengan capaian indikatornya:
- Tersedianya layanan public dan pemerintahan yang dilayani dengan aplikasi informatika, target 14 layanan, terealisasi 16 layanan atau 100%;

- Tersedianya aplikasi informatika yang memenuhi kriteria dan peraturan yang berlaku, target 52 aplikasi, terealisasi 100%;
- Tersedianya aplikasi informatika yang diimplementasikan, target 52 aplikasi, terealisasi 100%;

Tabel.2.2.1.
Daftar Aplikasi Informatika yang Memenuhi Kriteria dan Peraturan yang Berlaku Tahun 2020

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Link
1	EGOV	Website E-Government Merupakan Aplikasi Pemerintahan / e-Gov sebagai wahana pengumpulan aspirasi / kebutuhan masyarakat untuk pembangunan Kota Batam. Meliputi proses Musrenbang, forum OPD, Dewan, hingga RKPD Final	https://egov.batam.go.id/
2	SIPKD	Merupakan aplikasi keuangan daerah yang dikembangkan fitur dan kinerjanya oleh PT USADI SISTEMINDO INTERMATIKA.	https://sipkd.batam.go.id/
3	Aplikasi Pelayanan Online Kecamatan (APOK)	Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengurusan berkas administrasi kepada masyarakat Kota Batam secara online.	https://apok.batam.go.id/
4	Email Batam	Email.batam.go.id adalah Layanan email yang ada di Pemerintah Kota Batam untuk membuat akun email.	https://email.batam.go.id/
5	E-Office	Aplikasi yang mengakomodir pimpinan (Walikota/Wakil Walikota) atau pimpinan OPD untuk membuat surat disposisi.	https://office.batam.go.id/
6	Perizinan Online	Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengajuan perizinan kepada masyarakat Kota Batam secara online.	https://ptsp.batam.go.id/
7	SIKESDA	Aplikasi berbasis website yang memfasilitasi aktivitas transaksi dan layanan secara online di seluruh Puskesmas wilayah Kota Batam, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan obat.	https://sikesda.batam.go.id/
8	Pengaduan Online Apekesah	Layanan berbasis mobile dan website yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di wilayah kota Batam untuk membuat laporan pengaduan.	Apekesah Mobile
9	Website Portal Pemerintah Kota Batam	Portal batam.go.id adalah sebuah website yang menyediakan semua informasi dan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Batam. Portal	https://batam.go.id/

		initerdiri dari 4 (empat) kategori utama, yaitu pengaduan online, daftar aplikasi, media center dan website OPD.	
10	Media Center Pemerintah Kota Batam	Website Media Center yaitu media center.batam.go.id yang terletak di Kota Batam yang memfasilitasi aktivitas informasi secara online di Kota Batam, sehingga masyarakat, wartawan maupun pelajar dapat melihat dan memberikan aspirasinya dalam membangun Kota Batam menjadi kota yang madani	https://mediacenter.batam.go.id/
11	SIMPEG	Website simpeg.batam.go.id adalah sebuah aplikasi berbasis website yang memfasilitasi system informasi management kepegawaian sehingga memudahkan user dalam mengelola informasi kepegawaian yang ada di pemerintahan Kota Batam.	https://simpeg.batam.go.id/main/login
12	Website TSP	Aplikasi TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) merupakan program pemerintah yang dikhususkan kepada perusahaan yang hendak berpartisipasi untuk ikutserta menjalankan program pemerintah melalui CSR.	https://tsp.batam.go.id/
13	Aplikasi Tanda Tangan Digital Pemerintah Kota Batam	E-Signature (i-Teken) adalah aplikasi berbasis mobile yang digunakan untuk proses pembubuhan tandatangan elektronik (E-Signature) pada dokumen-dokumen yang diterbitkan secara elektronik pada aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. iTeken.	https://iteken.batam.go.id/
14	Direktori Kota Batam	Aplikasi berbasis website yang disediakan oleh Pemerintah Kota Batam untuk mencari informasi seputar lokasi/tempat yang ada di wilayah Kota Batam serta posting lokasi/tempat terbaru.	http://direktori.batam.go.id/
15	Arsip SKPD Pemerintah Kota Batam	Halaman iniberisi halaman web portal SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam Komentar, login dan update berita tidak diperkenankan lagi.	https://arsipskpd.batam.go.id/
16	Aplikasi Open Data Pemerintah Kota Batam	Open Data atau Data terbuka adalah suatu konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep ini serupa dengan konsep-konsep terbuka lainnya, seperti sumber terbuka, pemerintahan terbuka, dan Universitas Terbuka. Data terbuka dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu upaya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat. Open Data.	https://opendata.batam.go.id/
17	Aplikasi Disdukcapil Bisa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terus berupaya memberikan layanan yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan.	https://disdukcapilbisa.batam.go.id/
18	E-Billing	Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik Aplikasi e-Billing berfungsi sebagai pengganti pembayaran pajak secara manual ke elektronik (semua pajak daerah kecuali pajak pbb dan bphtb), manfaat yang	https://ebilling.batam.go.id/

		didapat dengan adanya aplikasi antara lain untuk wajib pajak memberikan kemudahan, keleluasaan waktu dan tempat dalam membayar pajak melalui perangkat elektronik yang mereka miliki. .	
19	E-BPHTB	Aplikasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.	https://ebphtb.batam.go.id/Login_v15/
20	E-PBB	Aplikasi Informasi dan Cetak SPPT	https://epbb.batam.go.id/adminroom/index.php
21	E-SPPT	SPPT adalah Aplikasi yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak PBB-P2 untuk melihat kewajiban pajak PBB-P2 terhutang sertamen cetak SPPT PBB-P2 .	https://esppt.batam.go.id/
22	E-ProfilPajak	Aplikasi Profil Wajib Pajak.	https://profilwp.batam.go.id/
23	SIEPENDA	Aplikasi Sistem Informasi Eksekutif Penerimaan Dispenda (Siependa) yang berfungsi memberikan informasi yang mudah dan cepat serta dapat di akses baik menggunakan komputer/desktop maupun hand phone berbasis android terhadap realisasi penerimaan pajak kepada Pimpinan sebagai salah satu bahan/masukan dalam pengambilan keputusan / kebijakan.	https://siependa.batam.go.id/
24	PPID Kota Batam	Website Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di bidang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada di domain Batam.go.id.	https://ppid.batam.go.id/
25	SistemAntrian MPP	Sistem antrian adalah aplikasi yang digunakan di Mall Pelayanan Publik Kota Batam untuk memudahkan user dalam pengelolaan antrian perizinan yang ada. Sistem Antrian MPP.	https://antrian.batam.go.id/Admin/Masuk
26	Aplikasi Buku Tamu	Aplikasi Buku Tamu Pemerintah Kota Batam adalah aplikasi untuk pelaporan yang bertamu ke kantor walikota Batam.	https://bukutamu.batam.go.id/login/
27	LPSE	LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan system pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.	https://lpse.batam.go.id/eproc4/
28	MPP	Website mpp.batam.go.id adalah sebuah portal yang menyediakan semua informasi layanan yang di akomodir di Mal Pelayanan Publik Kota Batam yang terdiridari 33 instansi dengan total 430 jenis layanan perizinan dan non-perizinan.	https://mpp.batam.go.id/
29	JDIH Kota Batam	Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sebuah website yang menyampaikan informasi perwako dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2020, berita dan informasi. .	https://jdih.batam.go.id/

30	Aplikasi Parkir Dishub	Aplikasi ini dibangun untuk Memantau Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Batam.	https://parkir.dishub.batam.go.id/
31	CCTV Kota Batam	Portal Matanya Batam adalah Aplikasi Pemerintah Kota Batam untuk membangun infrastruktur CCTV untuk memantau dan memonitor beberapa titik dan lokasi di kota Batam selama 24 jam dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Batam via website.	http://103.253.124.142/
32	Log CCTV	Aplikasi log CCTV adalah aplikasi yang mengelola semua data yang berhubungan dengan log CCTV dengan akses utama diberikan kepada operator CCTV. Operator CCTV dapat melihat dan mengelola data kejadian, data log CCTV, permintaan rekaman kejadian, serta melakukan absen datang dan pulang.	http://103.253.124.142/logcctv/
33	JDIH DPRD Kota Batam	Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sebuah website yang menyampaikan informasi produk hukum DPRD Kota Batam.	https://jdih.dprd.batam.go.id/
34	Aplikasi Perpustakaan Kota Batam	Aplikasi Pengelolaan Data Buku Perpustakaan atau INLIS Lite merupakan perangkat lunak (software) aplikasi otomatis perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.	https://perpustakaan.batam.go.id/
35	E-Rapor	E-rapor adalah sebuah system aplikasi berbasis Web yang diharapkan dapat merubah pola kerja guru dari pola manual ke pola digital dan juga dapat mempermudah guru dalam melakukan penilaian kesiswa bahkan sampai cetak rapor dan evaluasi nilai hasil belajar siswa.	https://smpn11.batam.go.id/erapor
36	SIMAPATDA	Sistem Manajemen Pendapatan Daerah atau SIMAPATDA merupakan satu jenis penerapan E-Government yang berbasis teknologi informasi Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. SIMAPATDA mengatur mulai dari perekaman data awal entry data, proses hingga mengeluarkan output.	https://simapatda.batam.go.id/simapatda/index.php?r=site/login
37	DAPODIK	Data Pokok Pendidikan atau Dapodik adalah system pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.	https://smpn11.batam.go.id:5000
38	SIAP-BMD	SIAP BMD merupakan system aplikasi yang memfasilitasi pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan barang, penatausahaan barang, hingga pelaporan barang milik daerah. SIAPBMD.	http://bmd-kemendagri.id:8080/loginbmd/index.jsf
39	Survey Pemerintah Kota	Survey adalah aplikasi web survei Pemerintah Kota Batam yang dikembangkan oleh dinas komunikasi	https://survei.batam.go.id

	Batam	dan informatika kota batam yang memuat Survey statistic Secara online. Survey Pemko Batam.	d/
40	Aplikasi Patroli Satpol PP Kota Batam	Patroli adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan berbasis website dan android untuk memfasilitasi petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Batam dalam melakukan pelaporan kegiatan patroli dan mencetak laporan kegiatan. Patroli Satpol PP.	https://patroli.batam.go.id/
41	Info Pemenang Tender	InfoTender adalah aplikasi pendataan tender yang di kelola oleh BPBJ Pemko Batam. Info Tender Pemko Batam.	https://infotender.batam.go.id/
42	Website Covid19 Kota Batam	Website Lawan Corona Pemko Batam.	https://lawancorona.batam.go.id/
43	Aplikasi Pemantauan Pendetang	Pemantauan Pendetang adalah aplikasi yang dikembangkan oleh dinas komunikasi dan informatika kota batam untuk mendata pendatang ke Kota Batam dengan informasi yang lebih detail selama pandemi Covid-19. Aplikasi Pemantauan Pendetang Pemko Batam	https://lawancorona.batam.go.id/pendetang/
44	Aplikasi Transparansi Hibah Bansos	Transparansi adalah aplikasi yang dikembangkan oleh dinas komunikasi dan informatika kota batam untuk mendata rekening koran untuk bantuan dan barang hibah masuk-keluar selama pandemi Covid-19. Transparansi Pemko Batam.	https://lawancorona.batam.go.id/transparansi/Admin/Masuk
45	Office Eblek	Eblek adalah aplikasi yang digunakan oleh Walikota Batam untuk mendisposisi surat kepada semua OPD/masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam Eblek Pemko Batam.	https://office.batam.go.id/eblek/Admin/Masuk
46	Aplikasi WBS	WBS adalah aplikasi pengaduan online yang dikelola oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Batam, untuk melaporkan pelanggaran/penyimpangan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Whistle Blowing System .	https://wbs.inspektorat.batam.go.id/
47	Aplikasi Rekening Koran/TRANSPARANSI	Transparansi adalah aplikasi yang dikembangkan oleh dinas komunikasi dan informatika kota batam untuk mendata rekening koran untuk bantuan dan barang hibah masuk-keluar selama pandemi Covid-19. Transparansi Pemko Batam.	https://lawancorona.batam.go.id/transparansi/Dashboard/RekeningMasuk
48	Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai	E-Kinbang adalah aplikasi/Sistem Informasi Kinerja Pembangunan yang digunakan untuk membuat Laporan Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Triwulan bagi Pejabat Eselon 4, 3 dan 2 di lingkup Pemerintah Kota Batam. E-Kinbang	https://e-kinbang.dev.batam.go.id/index.php/Auth
49	Sistem Informasi Pengrustamaan Gender dan Anak	ESIPUGA Adalah Sistem Informasi Pengrustamaan Gender dan Anak, Aplikasi ini dikembangkan oleh dinas komunikasi dan informatika kota batam dan dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	https://esipuga.batam.go.id/login

		Keluarga Berencana Kota Batam.	
50	Aplikasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	SILH adalah aplikasi yang dikembangkan oleh dinas komunikasi dan informatika kota batam dan dikelola oleh dinas Lingkungan Hidup. SILH atau Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. (Pasal 62, UU 32 tahun 2009 tentang PPLH) [1]	https://silh.dev.batam.go.id/
51	BDT Taskin	BDT Taskin/Basis Data Terpadu Adalah program penanggulangan kemiskinan untuk mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran yang akan menerima manfaat program berdasarkan kriteria keikutsertaan dan tujuan program. Pada dasarnya ini berarti ketepatan memilah kelompok masyarakat yang berhak atau yang tidak berhak menjadi peserta program. Efektivitas penetapan sasaran diyakini berdampak langsung terhadap keberhasilan pencapaian tujuan program perlindungan social dalam menanggulangi kemiskinan. [2]	https://bdttaskin.batam.go.id/
52	Aplikasi Sembako Covid-19 Versi 1 (import data)	Sembako adalah aplikasi yang dikembangkan oleh dinas komunikasi dan informatika kota batam untuk mendata pendistribusian sembako selama pandemi Covid-19.	https://lawancorona.batam.go.id/peduli/index.php/Auth

- Persentase Uptime email batam.go.id, target 95%, realisasi 100%;
- Tersedianya aplikasi informatika terintegrasi yang difasilitasi, target 3 aplikasi, realisasi 100%; Nama aplikasi :
 - 1) Aplikasi E-Government : sebagai system informasi pemerintah Kota Batam yang digunakan untuk melakukan pengelolaan, perencanaan, keuangan, asset, penatausahaan dan pengembangan modul untuk monitoring dan evaluasi keuangan daerah.
 - 2) Aplikasi PTSP-Online : aplikasi yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM_PTSP) yang berisi pelayanan perizinan.
 - 3) Aplikasi E-Kinbang : aplikasi yang berisi sistem informasi kinerja pembangunan, bidang administrasi pembangunan yang digunakan untuk menginput perjanjian kinerja pertahun dan perjanjian kinerja per triwulan.
- Terlaksananya pelaksanaan monitoring dan evaluasi aplikasi informatika, target 1 laporan, realisasi 100%.

- a. Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi, capaian kinerjanya:
- Terlaksananya beberapa titik lokasi terkoneksi jaringan internet/intranet, target 13 OPD, realisasinya 100%;

Tabel.2.2.2.
Daftar OPD yang Terhubung dengan Akses Internet
yang Disediakan oleh Dinas Kominfo Kota Batam Tahun 2020

No.	LOKASI /NAMA OPD	KET
GEDUNG BERSAMA		
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	
3	Dinas Pertanahan;	
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;	
5	Badan Kesbangpol	
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan;	
GEDUNG WALIKOTA		
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
9	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah;	
10	Inspektorat	
11	Dinas Komunikasi dan Informatika;	
12	Sekretariat DWP	
GEDUNG NONG ISA		
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	

- Tingkat kepuasan pengguna layanan internet, target 60% terealisasi 100 %;
- Persentase titik monitoring dan pemeliharaan infrastruktur TIK, target 33 titik, realisasinya 100%;
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Dinas Pertanahan;
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - Badan Kesbangpol;

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Sekretaris Daerah;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- Bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat ;
- Bagian Hukum;
- Asisten Perekonomian dan pembangunan;
- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Bagian Infrastruktur;
- Bagian Administrasi Pembangunan;
- Bagian Pengadaan barang dan jasa;
- Asisten Administrasi Umum;
- Bagian Umum;
- Bagian Organisasi;
- Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Badan Perencanaan dan penelitian pengembangan Pembangunan Daerah;
- Inspektorat;
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Sekretariat DPRD;
- Klinik;
- Media Centre;
- Ruang Rapat Gedung Walikota Lantai 4;
- Sekretariat DWP;
- Call Centre;
- Dekranasda.

- Laporan OPD terhadap pelaksanaan inventarisasi TIK, target 1 laporan.

Dengan table rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.
Laporan OPD terhadap pelaksanaan inventarisasi TIK

No.	Uraian	OPD	
		Sekretaris Daerah	Dinas Tenaga Kerja
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	
1.	Komputer Server	1	2
2.	Komputer/PC klien	14	32
3.	Laptop/Notebook klien		9
4.	Tablet		
5.	TV/Monitor		9
6.	Printer	7	54
7.	Scanner		2
8.	Proyektor		3
9.	CCTV		19
10.	UPS		5
11.	Stabilizer		
12.	Genset		1
13.	Tower/BTS		
14.	Switch/Hub	1	
15.	Router		
16.	Acces Point		
17.	Modem		3
18.	Bandwitch	8	20
19.	Wifi		
20.	Jaringan LAN		
21.	Rak Server		

- Jumlah Bandwidth yang dikelola di lingkungan Pemko Batam, target 200 Mbps, realisasi 100%.
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) yang telah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sampai dengan tahun 2020, adalah sebagai berikut:
 - Gedung Walikota - Gedung Nong Isa : 1.500 meter
 - Gedung Nong Isa - Gedung Bersama : 600 meter
 - Gedung Walikota - Masjid Agung : 500 meter

5. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah.
 Dengan 1(satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Metadata

Tabel.2.2.4

Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Statistik TA.2020

NO	URAIAN	TARGET		REALISASI			
		FISIK	KEUANGAN (Rp.)	FISIK	%	KEUANGAN (Rp.)	%
1	Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah.						
a)	Kegiatan Pengelolaan Metadata statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM	1 data statistik sektoral (primer dan sekunder)	17.280.000,00	1 data statistik sektoral (primer dan sekunder)	100	13.905.000,00	100

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi sebagai dasar dari perencanaan pembangunan. Dinas Kominfo Kota Batam melalui bidang Statistik telah mampu mengumpulkan data sektoral dari seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam (capaian 100%). Data tersebut telah diolah dan tersedia dalam bentuk dokumen/ **Buku Statistik Sektoral Kota Batam.**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Program yang menyelenggarakan urusan statistik yaitu :

Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan dengan capaian indikator kinerjanya yaitu :

Capaian Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah dicapai dengan melaksanakan **Kegiatan Pengelolaan Metadata Statistik Sektorial Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM** dengan capaian indikator kinerjanya yaitu :

1. Jumlah OPD yang mengikuti pelatihan Enumerator data statistik sektoral, target 44 OPD, terealisasi 100%;
2. Jumlah Forum satu data Tingkat Kota Batam, target 2x pertemuan, terealisasi 100%;
3. Jumlah Diseminasi data dan informasi statistik sektoral, target 12x pertemuan, terealisasi 6x pertemuan dan 3x zoom meeting.

Tabel 2.2.5.

Perkembangan Data Statistik Sektorial yang tersedia di Kota Batam Periode 2018-2020

NO	URAIAN	2018	2019	2020
1	Jumlah Jenis Data Statistik Sektorial	31	31	31
2	Jumlah Jenis Data Statistik Sektorial yang Tersedia	5	5	31
3	Persentase Jenis Data Statistik Sektorial Dalam Perencanaan Pembangunan	16	100%	100%
4	Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul dengan survey	-	1	2
5	Jumlah diseminasi data statistik sektoral	-	6 kali	9 kali

Tabel 2.2.6.

Capaian Target Indikator Kinerja Statistik TA.2020

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah (statistik)	100%, Uraianya: - 31 data statistik sektoral yang diolah dan dianalisis, - 1 dokumen hasil analisis dan pengolahan data statistik sektoral, - 2 data terkumpul melalui kerjasama antar instansi, - 12x desiminasi data statistik sektoral, - 31 data statistik sektoral yang tersedia dari seluruh OPD.	100%	100%

Tabel 2.2.7.

Prestasi Yang Telah di Raih Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam selama Tahun 2020.

1. Media Centre Pemerintah Kota Batam yang merupakan portal yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Meraih Juara 3 kontribusi aktif dalam pemberitaan kategori kabupaten/kota dari 163 Media Centre se-Indonesia (juara 3 Nasional)
2. Kominfo membuat Aplikasi JDIH Pemko dan DPRD untuk penginputan semua jenis produk hukum yang ada di lingkungan Kota Batam, pembuatan kedua aplikasi tersebut sesuai format Standar Pengelolaan JDIH Kemenhukumham Nomor 8 Tahun 2019. Selain pembuatan website yang tersimpan dalam server Diskominfo, Kominfo juga berhasil mengintegrasikan kedua website tersebut ke JDIH Nasional di bawah Badan Pengelolaan Hukum nasional (BPHN). Pada penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Batam menjadi Kota terbaik I dan terbaik II untuk kategori DPRD.
3. Diskominfo terlibat dalam pelaporan tahunan pada Aplikasi E-Reporting yang dikelola BPHN dan Inovasi –inovasi yang ada di JDIH Kota Batam seperti Majalah Digital.
4. Pemko Batam mendapatkan Juara Favorit pada lomba Video Inovasi daerah dalam penyiapan Tatanan Norma baru Produktif dan aman Covid-19 dimana video tersebut disiapkan oleh Tim Diskominfo sehingga memperoleh tambahan anggaran DID.
5. Nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Batam tahun 2020 meningkat menjadi 3,11 dengan kategori “Baik” dari tahun sebelumnya tercatat sebesar 2,23 dan masuk dalam kategori “cukup”.

Nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota

Batam tahun 2020, bahkan lebih tinggi dari indeks rata-rata nasional. Indeks ini berdasarkan penilaian dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.

BIDANG PENYELENGGARAAN EGOVERNMENT DAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

Sampai dengan Tahun 2020 untuk mendukung aktifitas informasi dan komunikasi di Kota Batam, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah melayani penyediaan jaringan internet dan intranet di 33 titik lokasi dari 13 OPD, sebagaimana tabel tersebut dibawah ini;

Tabel 2.2.8
Jaringan internet dan intranet Pemko Batam Tahun 2016 – Tahun 2020.

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Internet	22 OPD	25 OPD	25 OPD	25 OPD	13 OPD
2	Intranet	22 OPD	25 OPD	25 OPD	25 OPD	13 OPD

Sumber Bidang PE

Namun untuk Tahun Anggaran 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tidak menganggarkan kegiatan pembangunan jaringan internet yang baru. Selain itu, Pemerintah Kota Batam memiliki Situs resmi yang dapat diakses pada alamat batam.go.id. Selain halaman utama, juga terdapat 132 sub domain yang dipergunakan oleh beberapa aplikasi yang dikelola oleh masing-masing OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Tabel 2.2.9
Website Milik Pemerintah Kota Batam Tahun 2016 – Tahun 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Website Pemerintah Batam batam.go.id	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Sub domain	185	213	128	142	132

Sumber Bidang PE

Pada Tahun 2020 terdapat penurunan Sub Domain dari 142 menjadi 132 disebabkan perubahan metode perhitungan.

Pemutakhiran data maupun informasi pada Website resmi Pemerintah Kota Batam domain batam.go.id merupakan salah satu implementasi dari

keterbukaan informasi publik, pemerintah Kota Batam menjalin komunikasi dengan warga melalui website resmi milik Pemerintah Kota Batam yaitu www.batam.go.id. Dalam website tersebut warga Batam dapat melakukan berbagai macam aktifitas seperti memperoleh informasi tentang pembangunan dan kegiatan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam serta menyalurkan aspirasi berupa pengaduan dan mengajukan usulan pembangunan untuk tahun berikutnya.

Jumlah Kunjungan rata-rata per bulan ke website pada tahun 2020, sebanyak 13.743.274 kunjungan, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.2.10
Rata-rata Kunjungan per Bulan pada situs Pemerintah
Kota Batam Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata kunjungan website per bulan	301.402	342.960	423.980	213.722	13.743.274

Sumber Bidang KIP

Pada tahun 2020 terdapat peningkatan yang sangat jauh disebabkan perubahan metode perhitungannya. Pada tahun 2019 perhitungan jumlah pengunjung dan pengguna menggunakan skrip "*javascript*" yang dapat di nonaktifkan oleh antitracivy pada perambun modern. Pengunjung dihitung dari jumlah hitungan yang didapat dari log web server dengan memanfaatkan aplikasi Go Acces.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan prima yang efektif dan efisien, Pemerintah Kota Batam membangun aplikasi layanan publik berbasis TIK yang tersebar di OPD Pemerintah Kota Batam. Jumlah aplikasi layanan publik berbasis TIK yang dibangun pada tahun 2020 berjumlah 52 aplikasi.

Perkembangan jumlah aplikasi layanan publik berbasis TIK yang dibangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.11
Layanan Publik berbasis TIK Kota Batam
Tahun 2017 - 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Layanan Publik Berbasis TIK	5	54	137	140	12
2	Jumlah Layanan Publik	21	97	137	140	12
3	Persentase Layanan Publik Berbasis TIK	24	56	100	100	100

Sumber Bidang PE

Pada tahun 2020 (table 10), terjadi penurunan jumlah layanan public dan layanan publik berbasis TIK disebabkan perubahan cara pengukuran capaian, dimana yang di ukur adalah jenis/kategori layanan berdasarkan Perpres SPBE.

Layanan Publik berbasis TIK diatas dikembangkan ke arah berbasis web dengan maksud mempermudah masyarakat dalam mengakses dan menggunakan pelayanan publik berbasis TIK yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Batam. Dalam perkembangannya dapat dilihat pada tahun 2020 jumlah pengguna layanan publik berbasis web di kota Batam sebanyak 4.732.559 seperti yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.12a.
Jumlah pengguna Layanan Publik Berbasis TIK melalui web
Kota Batam Tahun 2017-2020

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK	2.798	8.722	4.451	4.732.559
2	Jumlah Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK melalui Web	2.215	2.798	8.722	4.732.559
3	Persentase Pengguna Layanan Publik Berbasis TIK melalui Web	100	100	100	100

Sumber Bidang PE

Peningkatan yang sangat jauh disebabkan perubahan metode perhitungannya. Pada tahun 2019 perhitungan jumlah pengunjung dan pengguna menggunakan skrip “javascript” yang dapat dinonaktifkan oleh antitracivy pada perambun modern. Untuk tahun 2020, pengunjung dihitung dari jumlah hitungan yang didapat dari log web server dengan memanfaatkan aplikasi Go Acces.

BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi sebagai dasar dari perencanaan pembangunan.

Dinas Kominfo Kota Batam melalui bidang Statistik telah mampu mengumpulkan data sectoral dari seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam (capaian 100%). Data tersebut telah diolah dan tersedia dalam bentuk dokumen/ ***Buku Statistik Sektoral Kota Batam***.

Tabel 2.2.12b.
Presentase Data Statistik Sektoral yang tersedia
di Kota Batam Tahun 2017-2020

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral	31	31	31	31
2	Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Tersedia	5	5	31	31
3	Persentase Jenis Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan Pembangunan	16	16	100%	100%
4	Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul dengan survey		-	1	2
5	Jumlah diseminasi data statistik sektoral		-	6 kali	9 kali

Sumber: Bidang Statistik Sektoral

Pada tahun Anggaran 2020, target data statistik sektoral dan data statistik yang tersedia tetap 31.

Bidang Persandian merupakan tambahan urusan lainnya yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Persandian didaerah Kabupaten/Kota meliputi Penyelenggaraan Persandian untuk

Pengamanan Informasi Pemerintah Kota dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah.

Pemerintah Kota Perka Lemsaneg Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota NSPK bidang persandian lainnya : bidang SDM, sarana dan prasana dll Kurang/lebih : 25 NSPK, selanjutnya Surat Edaran Kominfo No.05/SE/M.Kominfo/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Kehadiran Bidang Persandian untuk mengukur tingkat kerawanan dan keamanan informasi di Pemerintah Daerah, melakukan pemeriksaan terhadap ada atau tidaknya celah kerawanan pada Sistem Informasi di Pemerintah Daerah dan melakukan kegiatan Assessment Keamanan Sistem Informasi secara mandiri.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan kegiatan pengamanan komunikasi dan informasi yang berklasifikasi sejak tahun 2017 dan jenis layanan persandian Kota Batam sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 2.2.13
Layanan Persandian di Kota Batam sampai dengan Tahun 2020

NO	LAYANAN
1	Kirim Terima Berita
2	Counter surveillance
3	Penetration Test
4.	Signal Jamming
5.	Audit Keamanan Informasi
6.	Sertifikasi Elektronik
7.	Sosialisasi Kesadaran Keamanan

Sumber Bidang Persandian

Tabel 2.2.14
Capaian Kinerja Bidang Persandian Tahun 2017-2020

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020
1	OPD yang menerapkan sistem pengamanan informasi pada level V	-	-	1	2
2	% pegawai yang memiliki tingkat kesadaran keamanan	0.33%	1.36% (kumulatif)	1,36% (kumulatif)	1,36% (kumulatif)

	informasi dengan kategori baik				
3	Sistem elektronik yang telah memanfaatkan sertifikat elektronik	-	-	1 sistem dalam proses	
4	% OPD yang memanfaatkan layanan persandian untuk mengamankan elektronik	-	-	1 OPD	2 OPD
5	Jumlah kegiatan penting yang diamankan dengan persandian	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan
6	% infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak dan/atau fasilitas teknologi keamanan informasi	-	2.08%	2.08%	2.08%

Sumber: Bidang Persandian

Selain itu keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam melalui Bidang Persandian adalah adanya dukungan penuh dari **Badan Siber dan Sandi Negara dalam Pengembangan Persandian di daerah**

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuab dibidang Komunikasi dan Informatika daerah sesuai kewenangannya.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong atau permasalahan dan solusi yang diinginkan terkait kegiatan Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam:

No.	URAIAN		KETR
	PERMASALAHAN	SOLUSI	
1.	Belum adanya Rencana induk, Arsitektur dan kebijakan SPBE yang berperan atas perencanaan, anggaran, penyelarasan, penyiapan,implementasi dan wvaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.	Menyusun Rencana Induk, Arsitektur dan Kebijakan SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Batam.	
2.	Pengelolaan penyelenggaraan sistem jaringan intra dan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah yang belum terintegrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika seperti akses internet dan infrastruktur pendukungnya.	Melakukan koordinasi bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Batam terkait penyelenggaraan sistem jaringan intra dan sistem komunikasi intra Daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dimasukkan secara bertahap kedalam Rencana Strategis Kota Batam dalam 5 tahun ke depan.	
3.	Pergantian pejabat struktural (Sekretaris) yang menjabat sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pembantu (sesuai Perwako No. 8 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perwako No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam) Tahun 2021 sudah di usulkan kegiatannya, dikarenakan keterbatasan anggaran dan adanya pandemic covid-19 sehingga usulan tersebut belum disetujui.	Diusulkan kembali bimbingan teknis PPID untuk PPID pembantu dengan narasumber Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.	
	Kurangnya kemampuan mengembangkan tusi dalam hal penjabaran statistik sektoral	Mengikutsertakan SDM Bidang Statistik dalam pelatihan, Diklat maupun bimtek Statistik;	
	Belum adanya SDM yang menguasai keilmuan statistik;	Mengusulkan formasi kebutuhan ASN yang berlatar belakang keilmuan statistik ke BKPSDM Kota Batam;	
	Pengumpulan dan Pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemko Batam belum belum terlaksana secara optimal.	Membangun portal/aplikasi pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data statistik sektoral.	

	Kerjasama antar instansi dan diseminasi data statistik sektoral belum terlaksana secara optimal	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan OPD serta instansi vertikal yang ada di daerah melalui Perjanjian Kerjasama (MOU) dan Optimalisasi Forum Satu Data Tingkat Daerah. Mengoptimalkan publikasi statistik sektoral melalui layanan digital pemerintah, maupun media propaganda, promosi dan iklan.	

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada Tabel 2.3. berikut ini:

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
KOTA BATAM

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No.	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 9.674.959.596,00	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp10.642.455.555,60
1)	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi keuangan yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1 Tahun	Rp 7.910.255.179,00	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi keuangan yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1 Tahun	Rp 8.701.280.696,90
			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	1 Tahun	Rp 7.833.847.179		Batam	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	1 Tahun	Rp 8.617.231.896,90
			Tersedianya Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Tahun	Rp 76.408.000,00		Batam	Tersedianya Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Tahun	Rp 84.048.800,00
2)	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Rp 28.600.000,00	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Rp 31.460.000,00

				1 Tahun	Rp 28.600.000,00		Batam	Tersedianya pakaian dinas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1 Tahun	Rp 31.460.000,00
3)	Kegiatan Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1 Tahun	Rp 329.182.477,00	Kegiatan Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1 Tahun	Rp 362.100.724,70
			Tersedianya komponen alat-alat listrik	1 Tahun	Rp 9.510.432,00		Batam	Tersedianya komponen alat-alat listrik	1 Tahun	Rp 10.461.475,20
			Tersedia sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun	Rp 80.875.445,00		Batam	Tersedia sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun	Rp 88.962.989,50
			Tersedianya bahan logistik kantor	1 Tahun	Rp 9.000.000,00		Batam	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Tahun	Rp 9.900.000,00
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	Rp 13.096.600,00		Batam	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	Rp 14.406.260,00
			Terlaksananya koordinasi internal dan eksternal OPD yang mendukung tugas dan fungsi pemerintah	1 Tahun	Rp 216.700.000,00		Batam	Terlaksananya koordinasi internal dan eksternal OPD yang mendukung tugas dan fungsi pemerintah	1 Tahun	Rp 238.370.000,00
4)	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	Rp 1.016.981.500,00	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	Rp 1.118.679.650,00
			Tersedia sarana dan prasarana mebel yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun	Rp 810.398.000,00		Batam	Tersedia sarana dan prasarana mebel yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun	Rp 891.437.800,00

			Tersedia sarana dan prasarana Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun	Rp 206.583.500,00	Batam	Tersedia sarana dan prasarana Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun	Rp 227.241.850,00
5)	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Rp 94.645.440,00	Batam	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Rp 104.109.984,00
		Tersedia sarana dan prasarana Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	Tersedia sarana dan prasarana Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun	Rp 9.666.000,00	Batam	Tersedia sarana dan prasarana Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun	Rp 10.632.600,00
		Tersedia sarana dan prasarana Jasa Pelayanan Umum kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	Tersedia sarana dan prasarana Jasa Pelayanan Umum kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun	Rp 84.979.440,00	Batam	Tersedia sarana dan prasarana Jasa Pelayanan Umum kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun	Rp 93.477.384,00
6)	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Rp 295.295.000,00	Batam	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Rp 324.824.500,00
		Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun	Rp 225.405.000,00	Batam	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun	Rp 47.945.500,00

			Tersediannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun	Rp 69.890.000,00	Batam	Tersediannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	1 Tahun	Rp 76.879.000,00
2	Program : Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi			Rp 7.862.340.160,00		Program : Informasi dan Komunikasi Publik		Rp 7.184.327.700,00
1)	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah kota			Rp 7.862.340.160		Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Rp 7.184.327.700,00
		Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah kota Batam			Rp 1.331.133.160				
		Jumlah Publikasi kegiatan pemerintah kota Batam		1218 kali	Rp 5.365.023.680,00	Batam	Jumlah Publikasi kegiatan pemerintah kota Batam	1218 kali	Rp 5.901.526.048,00
		Persentase terlaksananya layanan informasi publik		100%	Rp 85.667.000,00	Batam	Persentase terlaksananya layanan informasi publik	100%	Rp 94.233.700,00
		Jumlah pemberitaan informasi pembangunan daerah		1250 kali	Rp 534.984.400,00	Batam	Jumlah pemberitaan informasi pembangunan daerah	1250 kali	Rp 588.482.840,00
					Rp 545.531.920,00	Batam	Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah kota Batam	145 kali (85%)	Rp 600.085.112,00

3	Program : Aplikasi Informatika	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publikberbasis online	Rp 9.868.000.942,00	Program : Aplikasi Informatika	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publikberbasis online	Rp10.854.801.036,20
1)	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online	Rp 5.523.000.058,00	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online	Rp 6.075.300.063,80
		Tersedianya nama domain pemerintah Kota Batam	Rp 1.979.208,00	Batam	tersedianya nama domain pemerintah Kota Batam	Rp 2.177.128,80
		Terlaksananya Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kab/Kota	Rp 63.206.400,00	Batam	Terlaksananya Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kab/Kota	Rp 69.527.040,00
		Jumlah OPD terhubung dan titik pemeliharaan yang dikelola dalam jaringan intra pemerintah daerah	Rp 5.457.814.450,00	Batam	Jumlah OPD terhubung dan titik pemeliharaan yang dikelola dalam jaringan intra pemerintah daerah	Rp 6.003.595.895,00
2)	Kegiatan : pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online	Rp 4.345.000.884,00	Kegiatan : pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online	Rp 4.779.500.972,40

			Jumlah dokumen perencanaan (SPBE) yang dihasilkan	1 Perwako dan 7 dokumen (buku)SPBE	Rp 313.863.740,00	Batam	Jumlah dokumen perencanaan (SPBE) yang dihasilkan	1 Perwako dan 7 dokumen (buku)SPBE	Rp 345.250.114,00
			Persentase Ketersediaan Layanan Email	95%	Rp 1.724.960.144,00	Batam	Persentase Ketersediaan Layanan Email	95%	Rp 1.897.456.158,40
			Jumlah Aplikasi Yang dikembangkan	30 aplikasi	Rp 2.249.708.000,00	Batam	Jumlah Aplikasi Yang dikembangkan	30 aplikasi	Rp 2.474.678.800,00
			Terlaksananya Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah		Rp 56.469.000,00	Batam	Terlaksananya Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah		Rp 62.115.900,00
4	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Kelengkapan data SIPD Kota Batam		Rp 118.478.300,00		Kelengkapan data SIPD Kota Batam		Rp 130.326.130,00
1)	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah		Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rp 118.478.300		Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rp 130.326.130
			Jumlah data Statistik Sektoral yang tersedia sebagai bahan acuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembagunan daerah	30%	Rp 118.478.300,00	Batam	Jumlah data Statistik Sektoral yang tersedia sebagai bahan acuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembagunan daerah	30%	Rp 130.326.130,00
5	Program : Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		Rp 202.469.900,00		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		Rp 153.645.800,00

1)	Kegiatan : Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Terlaksananya kegiatan kontra pengindraan dan jamming	1 kegiatan	Rp 202.469.900,00	Kegiatan : Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah		Terlaksananya kegiatan kontra pengindraan dan jamming	1 kegiatan	Rp 153.645.800,00
		Tersedianya kegiatan kontra pengindraan pada lokasi vital daerah	1 kegiatan	Rp 62.791.900,00		Batam	Tersedianya kegiatan kontra pengindraan pada lokasi vital daerah	1 kegiatan	Rp 69.071.090,00
			1 kegiatan	Rp 139.678.000,00		Batam	Tersedianya kegiatan kontra pengindraan pada lokasi vital daerah	1 kegiatan	Rp 153.645.800,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tidak memiliki usulan Program dan Kegiatan Masyarakat atau Musrenbang untuk Tahun 2022.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam						
No	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1)	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Rp 8.885.219.946,00	
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	Rp 7.910.255.179,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	Rp 7.833.847.179,00	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	Rp 76.408.000,00	
2)	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Rp 28.600.000,00	
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	Rp 28.600.000,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Rp 329.182.477,00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 9.510.432,00	
3)	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Rp 80.875.445,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Rp 9.000.000,00	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Rp 13.096.600,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Rp 216.700.000,00	
4)	-	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	Rp 227.241.850,00	
		Pengadaan Mebel		Jumlah jenis Mebel yang diadakan		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Rp 227.241.850,00	
		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan		
5)	-	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Rp 94.645.440,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jenis jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Rp 9.666.000,00	

		-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum kantor yang difasilitasi	Rp 84.979.440,00
	6)		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Rp 295.295.000,00
		-	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan	Rp 225.405.000,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Rp 69.890.000,00
	7)		Program : Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi	Rp 7.862.340.160,00
			Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah kota	Rp 7.862.340.160,00
		-	Pengelolaan Konten dan perencanaan media komunikasi publik		Rp 1.331.133.160,00
		-	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi kegiatan pemerintah kota batam	Rp 5.365.023.680,00
		-	Pelayanan Informasi Publik	Persentase terlaksananya layanan informasi publik	Rp 85.667.000,00
		-	Layanan Hubungan Media	Jumlah pemberitaan informasi pembangunan daerah	Rp 534.984.400,00
		-	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah Kota Batam	Rp 545.531.920,00
3.	8)		Program Aplikasi Informatika	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online	Rp 9.868.000.942,00
			Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online	Rp 5.523.000.058,00
		-	Pendaftaran nama domain pemerintah	Jumlah nama domain pemerintah kota batam yang terdaftar	Rp 1.979.208,00
		-	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan layanan server nama domain (DNS)	Rp 63.206.400,00
		-	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah titik (OPD, ruang server dan CCTV) yang menggunakan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Rp 5.457.814.450,00
	9)		Kegiatan : pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online	Rp 4.345.000.884,00
		-	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen perencanaan dan kebijakan SPBE yang disusun	Rp 313.863.740,00
		-	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan layanan email	Rp 1.724.960.144,00

				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	Rp 2.249.708.000,00	
		-		Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah		Jumlah layanan yang saling terhubung	Rp 56.469.000,00	
4.				Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Batam	Kelengkapan data SIPD Kota Batam	Rp 118.478.300,00	
		-		Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral		Jumlah data Statistik Sektoral yang tersedia sebagai bahan acuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah	Rp 118.478.300,00	
5.				Program : Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Rp 202.469.900,00	
	11)			Kegiatan : Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Batam	Terlaksananya kegiatan kontra pengindraan dan AUDIT KAMI (Keamanan Informasi)	Rp 202.469.900,00	
		-		Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah		Terlaksananya kegiatan kontra pengindraan dan AUDIT KAMI (Keamanan Informasi)	Rp 62.791.900,00	
		-		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp 139.678.000,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan persiapan 5 (lima) program prioritas guna mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, sehingga mendorong masyarakat Tanah Air menjadi masyarakat digital.

Kelima program tersebut terdiri dari:

- Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- Pengelolaan spektrum frekuensi;
- Pemanfaatan TIK;
- Penataan Pos dan Informatika;
- Komunikasi Publik.

Dengan adanya pandemic Covid-19 mendorong percepatan transformasi digital nasional. Selain itu Kemenkominfo melakukan percepatan infrastruktur dengan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) serta akses internet di wilayah non-komersial. Kemenkominfo juga melakukan persiapan pusat data nasional sebagai Langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan public dan dukungan sosialisasi Pilkada 2020. Kemenkominfo juga menargetkan seluruh desa dan kelurahan seluruh Indonesia sudah terjangkau dengan layanan 4G. Dan menargetkan 25% dari total pengguna smartphone saat ini di Indonesia menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi.sumber; Medcom.id.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian, maka ditetapkan di dalam Renstra OPD Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan adalah:

“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan TIK”.

Sasaran Dinas sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan berbasis TIK;
2. Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang aktual dan faktual;

Adapun tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
Tahun 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi dan Target Kinerja Tujuan		Realisasi kinerja Sasaran pada Tahun ke-			Target Kinerja sasaran Tahun ke-		
				2016	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaata TIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan berbasis TIK	Persentase Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan	0	61%	42%	46%	52%	53%	57%	61%
			Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	0	20%	0	0,33 %	5%	10%	15%	20%
		Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang aktual dan faktual	Nilai Keterbukaan Informasi bagi badan publik level Kabupaten/Kota	88	90	88	88,3 3	88,6	89	90	90
			Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan	0	100%	0	4%	13%	25%	25%	33%

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, maka ditetapkan 5 (lima) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, didukung 6 kegiatan :

- ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- ❖ Kegiatan Umum Perangkat Daerah
- ❖ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik, didukung 1 kegiatan :

- ❖ Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

3. Program Aplikasi Informatika, didukung 2 kegiatan :

- ❖ Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- ❖ Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, didukung 1 kegiatan :

- ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah

5. Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

didukung 1 kegiatan :

- ❖ Kegiatan : Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Selanjutnya uraian Rumusan Program dan Kegiatan diatas dapat dilihat lebih jelas dan rinci pada lampiran dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

No.	Program	Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1).Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2).Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Umum Perangkat Daerah
		3).Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		4).Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5).Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Informasi dan Komunikasi Publik	1).Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
3	Aplikasi Informatika	2).Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah
		3).Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4).Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah
5	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	5).Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk lebih jelasnya uraian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam TA. 2022 sebagaimana tabel. T-C. 31 terlampir.

Tabel 3.3.1/
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	9.674.959.596,00	APBD II		100%	Rp 9.751.017.755,60
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi		100%	Rp 7.910.255.179,00			100%	Rp 8.701.280.696,90
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang digaji dan diberi tunjangan	Batam	33 orang	Rp7.833.847.179,00			33 orang	Rp 8.617.231.896,90
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	Batam	12 Kegiatan	Rp 76.408.000,00			1 kegiatan	Rp 84.048.800,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		100%	Rp 28.600.000,00			100%	Rp 31.460.000,00

				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang disediakan	Batam	33 stel	Rp 28.600.000,00			71 stel	Rp 31.460.000,00
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah		100%	Rp 329.182.477,00			100%	Rp 362.100.724,70
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Batam	11 jenis	Rp 9.510.432,00			11 jenis	Rp 10.461.475,20
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Batam	51 jenis	Rp 80.875.445,00			51 jenis	Rp 88.962.989,50
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Batam	2 jenis	Rp 9.000.000,00			2 jenis	Rp 9.900.000,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan pengadaan yang disediakan	Batam	5 jenis	Rp 13.096.600,00			5 jenis	Rp 14.406.260,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Batam	182 kali	Rp 216.700.000,00			182 kali	Rp 238.370.000,00
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase kebutuhan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		100%	Rp 1.016.981.500,00			100%	Rp 227.241.850,00
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Batam	2 Unit	Rp 810.398.000,00			2 Unit	Rp 891.437.800,00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Batam	10 jenis	Rp 206.583.500,00			10 jenis	Rp 227.241.850,00
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi		100%	Rp 94.645.440,00			100%	Rp 104.109.984,00

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Batam	1 jenis	Rp 9.666.000,00			1 jenis	Rp 10.632.600,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum kantor yang difasilitasi	Batam	3 orang	Rp 84.979.440,00			3 orang	Rp 93.477.384,00
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana paratur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah		100%	Rp 295.295.000,00			100%	Rp 324.824.500,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan	Batam	7 unit	Rp 225.405.000,00			7 unit	Rp 247.945.500,00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Batam	6 unit	Rp 69.890.000,00			6 unit	Rp 76.879.000,00
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota		86%	Rp 7.862.340.160,00	APBD II		86	Rp 6.584.242.588,00
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan (Persentase) kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik		100%	Rp 7.862.340.160,00			Rp 100	Rp 6.584.242.588,00
			Pengelolaan Konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah konten komunikasi publik yang diproduksi	Batam	77 konten	Rp 1.331.133.160,00				Rp 1.464.246.476,00
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi pesan di media komunikasi publik	Batam	1515 kali	Rp 5.365.023.680,00				Rp 5.901.526.048,00

					Jumlah laporan evaluasi penggunaan media komunikasi publik		12 laporan						
					Jumlah media komunikasi publik pemda yang dikelola		4 media						
				Pelayanan Informasi Publik	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Batam	80 %	Rp 85.667.000,00					Rp 94.233.700,00
					Persentase informasi publik yang tersedia		76 %						
					Persentase pelaksanaan uji konsekuensi		1 kali						
					Persentase permintaan informasi yang terlayani		91 %						
					Jumlah dokumen laporan hasil monitoring opini dan aspirasi publik		2 laporan						
					Jumlah pengumpulan pendapat umum		2 laporan						
					Jumlah laporan rekomendasi berdasarkan aduan masyarakat		2 laporan						
				Layanan Hubungan media	Jumlah kunjungan ke media	Batam	1 kali	Rp 534.984.400,00					Rp 588.482.840,00
					Jumlah liputan media yang terlaksana		600 kali						
					Jumlah pelaksanaan konferensi pers,		3 kali						
					Jumlah pelaksanaan kunjungan pers		12 kali						
					Jumlah pertemuan dengan media		1 kali						

					Nilai Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik		2,83					
					Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Kabupaten/Kota Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah layanan elektronik yang menggunakan nama domain pemerintah (berdasarkan pemetaan data penilaian kepatuhan standart pelayanan publik)		350	Rp 5.523.000.058,00		68%	Rp 6.075.300.063,80
					Pendaftaran nama domain pemerintah Kab/Kota	Jumlah nama domain pemerintah kota batam yang terdaftar	Batam	8 domain	Rp 1.979.208,00		8 domain	Rp 2.177.128,80
					Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kab/Kota	Persentase ketersediaan layanan server nama domain (DNS)	Batam	99% Uptime	Rp 63.206.400,00		99% Uptime	Rp 69.527.040,00
					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah (OPD) yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah	Batam	45%	Rp 5.457.814.450,00		15 titik	Rp 6.003.595.895,00
					Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Domain Tata Kelola		2,25	Rp 4.345.000.884,00		68%	Rp 4.779.500.972,40
						Nilai Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Domain Tata Kelola		2,00				
					Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen perencanaan dan kebijakan SPBE yang disusun	Batam	2 Dokumen	Rp 313.863.740,00		2 Dokumen	Rp 345.250.114,00
					Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah	Batam	96%	Rp 1.724.960.144,00		95%	Rp 1.897.456.158,40

				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikembangkan atau dikelola	Batam	37 aplikasi	Rp 2.249.708.000,00			30 aplikasi	Rp 2.474.678.800,00
				Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan yang saling terhubung	Batam	4 layanan	Rp 56.469.000,00			4 layanan	Rp 62.115.900,00
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah		100%	Rp 118.478.300,00	APBD II		100%	Rp 130.326.130,00
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang tersedia		100%	Rp 118.478.300,00			100%	Rp 130.326.130
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral yang dilakukan	Batam	24 data	Rp 118.478.300,00			10 Data	Rp 130.326.130,00
					Jumlah Diseminasi/Publikasi Data statistik sektoral		13 kali					
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		35%	Rp 202.469.900,00	APBD II		35%	Rp 153.645.800,00
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Persandian untuk Pengendalian Keamanan Informasi Pemda		4 kali	Rp 202.469.900,00			1 Tahun	Rp 153.645.800,00

				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pelaksanaan kegiatan kemanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Batam	1 kali	Rp 62.791.900,00			1 Tahun	Rp 69.071.090,00
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Batam	1 kali	Rp 139.678.000,00			1 Tahun	Rp 153.645.800,00
TOTAL								Rp 27.726.248.898,00				Rp 29.112.561.342,90

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran.

Rincian kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2022 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Batam dapat dilihat dari tabel RKPD terlampir:

Tabel 4.1.
Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam										
Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				26.725.142.298,00	#REF!
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				26.545.212.298,00	
2	16	01	2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	9.307.654.058,00	
2	16	01	2	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		1 Tahun	7.960.711.600,00	
2	16	01	2	02	01	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	7.904.314.600,00	
2	16	01	2	02	03	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	56.397.000,00	

2	16	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						28.600.000,00	
2	16	01	2	05	02		Tersedianya pakaian dinas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DISKOMINFO	100%		28.600.000,00	
2	16	01	2	06		Kegiatan Umum Perangkat Daerah						637.005.130,00	
2	16	01	2	06	01		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan ruangan kantor diskominfo	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISKOMINFO	100%		7.005.130,00	
2	16	01	2	06	02		Tersedia sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	DISKOMINFO	100%		200.000.000,00	
2	16	01	2	06	04		Tersedianya bahan logistik kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISKOMINFO	100%		150.000.000,00	
2	16	01	2	06	05		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISKOMINFO	100%		30.000.000,00	
2	16	01	2	06	09		Terlaksananya koordinasi internal dan eksternal OPD yang mendukung tugas dan fungsi pemerintah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD	DISKOMINFO	100%		250.000.000,00	
2	16	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang						401.267.600,00	
2	16	01	2	07	05		Tersedia sarana dan prasarana mebel yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	Pengadaan Mebel	DISKOMINFO	100%		50.160.000,00	

2	16	01	2	07	06	Tersedia sarana dan prasarana Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKOMINFO	100%	351.107.600,00	
2	16	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DISKOMINFO		114.479.728,00	
2	16	01	2	08	02	Tersedia sarana dan prasarana Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISKOMINFO	100%	21.135.400,00	
2	16	01	2	08	04	Tersedia sarana dan prasarana Jasa Pelayanan Umum kantor yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	DISKOMINFO	100%	93.344.328,00	
2	16	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		DISKOMINFO		165.590.000,00	
2	16	01	2	09	02	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISKOMINFO	100%	95.000.000,00	

2	16	01	2	09	06	Tersediannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISKOMINFO	100%	70.590.000,00	
2	16	02	2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				7.084.935.840,00	
2	16	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			A (81,25 - 100) Indeks	7.084.935.840,00	
2	16	02	2	01	05	Jumlah Publikasi kegiatan pemerintah kota Batam	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Batam	1218 kali	4.980.223.680,00	
2	16	02	2	01	06	Persentase terlaksananya layanan informasi publik	Pelayanan Informasi Publik	Kota Batam	100%	536.692.800,00	
2	16	02	2	01	07	Jumlah pemberian informasi pembangunan daerah	Layanan Hubungan media	Kota Batam	1250 kali	417.464.400,00	
2	16	02	2	01	12	Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah kota Batam	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	Kota Batam	145 kali (85%)	1.150.554.960,00	
2	16	03	2			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			100%	10.152.622.400,00	
2	16	03	2	01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Kabupaten/Kota Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah			68%	6.812.449.000,00	

2	16	03	2	01	01	tersedianya nama domain pemerintah kota batam	Pendafiaran nama domain pemerintah Kab/Kota			2.072.000,00		
2	16	03	2	01	02	Terlaksananya Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kab/Kota	Penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kab/Kota			58.377.000,00		
2	16	03	2	01	03	Jumlah Titik (OPD, Ruang Server dan CCTV) yang menggunakan sistem jaringan intrapemerintah daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Batam	15 titik	6.752.000.000,00		
2	16	03	2	02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online		68%	3.340.173.400,00		
2	16	03	2	02	01		Penatalaksanaan dan pengawasan e-gove dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kab/kota	Kota Batam		420.000.000,00		
2	16	03	2	02	02	Jumlah dokumen perencanaan (SPBE) yang dihasilkan	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Batam	1 Perwako dan 7 dokumen (buku)SPBE	750.000.000,00		
2	16	03	2	02	04	Persentase Ketersediaan Layanan Email	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kota Batam	95%	283.793.400,00		
2	16	03	2	02	07	Jumlah Aplikasi Yang dikembangkan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Batam	30%	1.856.400.000,00		

2	16	03	2	02	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah	Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah		29.980.000,00	
2	20						Kelengkapan data SIPD Kota Batam			89.760.000,00	
2	20	02						Kota Batam	100%	89.760.000,00	
2	20	02	2	01			Jumlah data Statistik Sektoral yang tersedia sebagai bahan acuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah			89.760.000,00	
2	20	02	2	01	01		Kelengkapan Data SIPD Kota Batam	Kota Batam		89.760.000,00	
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah			90.170.000,00	
2	21	02						Kota Batam	100%	90.170.000,00	
2	21	02	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan kontra pengindraan dan jamming	Kota Batam	1 Tahun	90.170.000,00	
2	21	02	2	01	03		Tersedianya kegiatan kontra pengindraan pada lokasi vital daerah	Kota Batam	35%	90.170.000,00	

BAB V.

PENUTUP

Ranhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dilaksanakan tahunan yang merupakan titik awal pelaksanaan program dan kegiatan OPD berguna sebagai pedoman dalam mencapai capaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis OPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2016-2021. Dokumen Rancangan Renja memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Penyusunan Ranhir Renja OPD adalah bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Penyusunan Ranhir Renja Tahun 2022 mengacu pada hasil evaluasi program dan kegiatan OPD pada tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang berarti dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di tahun yang akan datang.

Dalam penyusunan Ranhir Renja ini dirasa jauh dari kesempurnaan, diharapkan adanya masukan, kritikan yang bisa memperbaiki pembuatan Renja-renja dimasa yang akan datang.

Batam, 09 Agustus 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BATAM



AZRIL APRIANSYAH, ST, MT
Pembina Tingkat I
Nip. 19730408 200212 1 005

Formulir E.70

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM**

		HasilPengendaliandanEvaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak	Tindak Lanjut Penyempurna an Apabila Tidak
			Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab KetidakSesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	✓			

**CHECK List Kelengkapan Bahan Verifikasi Rancangan Akhir Renja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam**

PERANGKAT DAERAH :

No	Bahan	Keterangan
1.	Rancangan Akhir Renja PD yang telah ditandatangani	Ada
2.	SK Tim PenyusunanRenja PD	Ada
3.	Formulir E.70	Ada
4.	Hasil Pemetaan Rencana Kerja Tahun 2020 sesuai dengan Permendagri 90/2019	Ada
5.	Renja Hasil cetak SIPD	Ada
REKOMENDASI		

Batam, Juli 2021

PERANGKAT DAERAH

Bapelitbangda

Jabatan

Kasubid

NAMA

NAMA

Formulir E.71

**Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam**

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	

Batam, Juli 2021

**Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian
Pengembangan Pembangunan Daerah
Kota Batam**



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, Fax. (0778) 461349
Website : batam.go.id, Website Kominfo : kominfo.batam.go.id
email : kominfo@batam.go.id
BATAM

Kode Pos : 29464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM

Nomor : KPTS.120/KOMINFO/VII/2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2022
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2022 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2022 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 06 Juli 2021

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM



AZRIL APRIANSYAH, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
Nip. 19730408 200212 1 005

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN	
1.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM	JABATAN DALAM TIM PENGARAH
2.	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM	PENANGGUNGJAWAB
3.	KASUB.BAG. PERENCANAAN PROGRAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM	SEKRETARIS
I	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	
NO.	JABATAN	
1	KABID. KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	JABATAN DALAM TIM KOORDINATOR
2.	KASI. KEMITRAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	ANGGOTA
3.	KASI. PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	ANGGOTA
4.	KASI. LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	ANGGOTA

II PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT		
NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KABID. PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	KOORDINATOR
2.	KASI. TATA KELOLA E-GOVERNMENT	ANGGOTA
3.	KASI. PENGEMBANGAN APLIKASI	ANGGOTA
4.	KASI. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	ANGGOTA
III PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG STATISTIK		
1	KABID. STATISTIK	KOORDINATOR
2	KASI PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL	ANGGOTA
3	KASI. ANALISIS DAN PENGELOLAAN DATA STATISTIK SEKTORAL	ANGGOTA
4	KASI. KERJASAMA DAN PENERANGAN STATISTIK SEKTORAL	ANGGOTA
IV PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PERSANDIAN		
1	KABID. PERSANDIAN	KOORDINATOR
2	KASI. OPERASIONAL PENGAMANAN PERSANDIAN	ANGGOTA
3	KASI. TATA KELOLA PERSANDIAN	ANGGOTA
4	KASI. PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	ANGGOTA

V	PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI SEKRETARIAT	
	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	1 KASUB.BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOORDINATOR
	2 KASUB. BAG. KEUANGAN	ANGGOTA
3	PELAKSANAAN SUB.BAG. PERENCANAAN PROGRAM	ANGGOTA

Batam, Juli 2021

KEPALA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA BATAM



AZRIL APRIANSYAH, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

Nip. 19730408 200212 1 005